

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah isi dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridids Normatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya belum sesuai atau belum diatur secara lengkap. Serta ada pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sesuai fakta yang ada tidak semua hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur pula di dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut. Maka pengaturan hak pegawai pemerintah non pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya perlu diperhatikan kembali, dan menjadi pertimbangan agar kedepannya disusun payung hukumnya.

**Kata Kunci:** Keputusan Sekretaris MA, Pegawai Pemerintah Non PNS, Undang-undang Ketenagakerjaan

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the contents of the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 811/SEK/SK/VIII/2021 concerning the Management of Non-Civil Servant Government Employees at the Supreme Court and the Judiciary Bodies under it are in accordance with the Legislative Regulations applicable. This research is included in Normative Jurisdiction research. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The research results show that the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 811/SEK/SK/VIII/2021 concerning the Management of Non-Civil Servant Government Employees at the Supreme Court and the Judiciary Bodies under it is not appropriate or has not been fully regulated. And there are articles that conflict with applicable laws and regulations, namely Law Number 13 of 2003 concerning Employment. According to existing facts, not all workers' rights regulated in the Employment Law are also regulated in the Decree of the Secretary of the Supreme Court. So the regulation of the rights of non-civil servants in the Supreme Court and the Judicial Bodies below it needs to be taken into account again, and become a consideration so that in the future the legal umbrella will be formulated.

**Keywords:** Decision of the Supreme Court Secretary, Non-PNS Government Employees, Law Employment